PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

"Menilai Kinerja Bisnis & Ekonomi Indonesia: Problematika, Perspektif, & Prospek"

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2012

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

"Menilai Kinerja Bisnis & Ekonomi Indonesia: Problematika, Perspektif, & Prospek".

Hak Cipta© 2012, pada Penulis/Penerbit

Hak Publikasi pada Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Atma Yogyakarta

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama, Mei 2012

Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta
Telpon 0274 -487711 Psw. 3129 Faks. 0274-485227
E-mail : semnascfp@gmail.com

ISBN : 978-602-98157-3-3

Editor :
Y. Sri Susilo

Lay Outer :
F. Joki Hartono Tri Nugroho

DAFTAR ISI

AKUNTANSI

ANALISIS PERATAAN LABA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010)
Efrianus Landu Mila dan Supatmi 3

ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI - *Sri Fadilah* 18

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONSERVATISME DAN PENGARUH KONSERVATISME TERHADAP ASIMETRI INFORMASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2007-2009
Selviah, Rizka I. Arfianti dan Joko Sangaji 38

PENGARUH PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN, DEBT TO EQUITY RATIO, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KANTOR AKUNTAN BESAR TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)
Inge Lesmana dan Yeterina Widi Nugrahanti 49

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERINGKAT DAN YIELD OBLIGASI
Michael Glen Aldo dan MI Mitha Dwi Restuti 66

RELEVANSI NILAI LABA DAN KOMPONEN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN CURRENT RATIO SEBAGAI PEMODERASI RELEVANSI NILAI ARUS KAS OPERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2008 – 2010
Cathlin Valencia dan Mulyani 80

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN LABA DENGAN MENGGUNAKAN KUALITAS KAP SEBAGAI VARIABEL MODERATING DAN PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN
Vicitta, Rizka Indri Arfianti dan Dergibson Siagian 94

PENERIMAAN AUDITOR TERHADAP UNDER-REPORTING TIME
Ceacilia Srimindarti dan Elen Puspitasari 108

ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN METODE EVA PADA SEBELUM, SELAMA, SESUDAH KRISIS GLOBAL TAHUN 2008
Suci Kurniawati 121

MENTAL ACCOUNTING DAN VARIEBL DEMOGRAFI : SEBUAH FENOMENA PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT
Linda Ariany Mahastanti dan Katarina Kumalasari Wiharjo 142

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN YANG MEMPENGARUHINYA: STUDI PADA WAJIB PAJAK KOTA KUPANG
Selfy Karlinda Fobia dan Theresia Woro Damayanti 159

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP MANAJEMEN LABA
Achmad Romadhoni dan Prima Naomi 172

PENGENDALIAN KELUARGA, DEWAN KOMISARIS DAN KINERJA PERBANKAN INDONESIA
Surifah 185

PENGARUH KEPEMILIKAN ORANG DALAM (INSIDER OWNERSHIP) DAN HUTANG TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
Ricky, Paskah Ika Nugroho dan Ari Budi Kristanto 203

PERBEDAAN PENGETAHUAN MASYARAKAT UMUM DENGAN MAHASISWA AKUNTANSI TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) PADA BARANG ELEKTRONIK DI KOTA YOGYAKARTA
Christophorus Heni Kurniawan 216

PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo 231

EKSPLORASI MOTIF PENGELOLA ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK DAN BPR DALAM PREFERENSI PENERAPAN SAK ETAP DI YOGYAKARTA
Anna Purwaningsih, SE., M.Si., Ak. 245

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN TERPADU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS E-GOVERNMENT
Wing Wahyu Winarno 260

EKONOMIKA

PRO-GROWTH, PRO-JOB, PRO-POOR DI ERA PRESIDEN SBY: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
Mudrajad Kuncoro 273

PROBLEMATIKA DAN PROSPEK BISNIS EKONOMI INDONESIA
P. Julius F. Nagel 295

DAMPAK ERUPSI MERAPI DAN KEMISKINAN DI KECAMATAN CANGKRINGAN
Tri Siwi Nugrahani 304

PERAN PRODUKTIVITAS KAPITAL DAN TENAGA KERJA SERTA PERUBAHAN TEKNOLOGI DALAM PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI JAWA TIMUR
Nurul Istifadah 316

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Nuryasman MN 327

ANALISIS INDIKATOR SOLVENCY BANK PADA PERIODE KRISIS MONETER DAN KRISIS GLOBAL TERHADAP BUSN DEVISA DI INDONESIA, PERIODE 1998 – 2009.
Marlina Deasy Hartanto, Ishak Ramli dan Darmawan Achmad 344

PERANAN KREDIT DALAM MENDORONG KINERJA USAHA KECIL
Bayu Nuswantara 357

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI LEMAH MELALUI PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA MIKRO
Sukirman 383

PENGARUH UTANG LUAR NEGERI DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2000.1 – 2008.4
Dyah Wahyuning Tyas, Y. Sri Susilo dan Rini Setyastuti 396

FLUKTUASI HARGA MINYAK DUNIA DAN PENCAPAIAN SUSTAINABILITAS FISKAL INDONESIA
Sri Suharsih 409

MANAJEMEN

PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) WILAYAH SURABAYA (KANTOR POS BESAR I)
Nur Handayani dan Agus Kukuh 429

MEDIASI CITRA MEREK DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BRAND EXPERIENCE DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA STARBUCKS COFFEE KELAPA GADING JAKARTA
Felicia Kweesly dan Dergibson Siagian 449

PENERAPAN NILAI INTEGRITAS DAN PERSPEKTIF GENDER DALAM PERILAKU BERETIKA
Iin Mayasari, Iyus Wiadi, Anita Maharani dan Rini S. Pramono 463

SERVICE RECOVERY: SOLUSI PROBLEMATIKA KINERJA BISNIS (STUDI KASUS DI BANK CENTRAL ASIA, KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DARMO, SURABAYA)
Christina Esti Susanti dan Hernanto Vidyatama 491

SKOR RISIKO KREDIT, ANALISIS DISKRIMINAN DAN KELAYAKAN KREDIT MODAL KERJA
Hari Sukarno dan Elok Faiqotul Himmah 511

AGENCY PROBLEM AND PERFORMANCE EFFECT ON FINANCIAL DECISION ON STOCKS LISTED INDONESIA STOCK EXCHANGE YEARS 2007-2009
Agus Zainul Arifin 524

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS MELALUI KEPUASAN KONSUMEN RESTORAN FAMILY RIA JAKARTA
Regina Winata dan Dergibson Siagian 541

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ASET, PEMILIHAN SAHAM, DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA (PERIODE 2006 - 2010)
Rintis Eko Widodo, Nursiam dan Rina Trisnawati 553

THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL CONTEXTUAL FACTORS ON FIRM'S RESOURCES-PERFORMANCE RELATIONSHIPS
Lena Ellitan 562

ANALISIS PENGARUH NILAI (VALUE), PENGETAHUAN (KNOWLEDGE), DAN SIKAP (ATTITUDE) KONSUMEN TERHADAP KESEDIAAN MEMBAYAR LEBIH UNTUK PRODUK RAMAH LINGKUNGAN (STUDI KASUS KONSUMEN THE BODY SHOP, PLAZA SENAYAN, JAKARTA)
Prita Karina dan Efendi 588

THE COMPARISON OF PERFORMANCE AMONG NINE BIGGEST BANKS IN INDONESIA BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA BANKING ARCHITECTURE
Krisna Wijaya1 and Roberto Akyuwen 596

FINANCIAL ATTITUDES DAN SPENDING HABITS MAHASISWA DITINJAU DARI PERBEDAAN JENIS KELAMIN
Yohanes Sutrisno dan Maria Rio Rita 613

SIKAP ENTREPRENEURSHIP: KUNCI SUKSES KINERJA PEREMPUAN PELAKU INDUSTRI KREATIF DI MALANG ENTREPRENEURSHIP: A KEY SUCCESS ON WOMEN'S PERFORMANCE AS ACTOR OF CREATIVE INDUSTRY
Rahayu Relawati1 dan Titik Ambarwati 626

DIGITAL ECONOMY : PENERAPAN E-BUSINESS SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN UKM DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA UKM
Estu Widarwati 638

ANTESEDEN RISK DAN TRUST YANG MEMPENGARUHI SIKAP INDIVIDU TERHADAP NIAT ADOPSI E-BANKING
Edy Purwo Saputro dan Fereshti Nurdiana Dihan 649

PENGARUH HEALTH CONSCIOUSNESS, ENVIRONMENT ATTITUDE, PRODUCT KNOWLEDGE DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP MINAT BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG MENGANDUNG OKSIGEN
Indah Purnamasari 660

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG DAN NILAI PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIK PADA PERUSAHAAN SEKTOR NONJASA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2010
Mafizatun Nurhayati 674

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL (STUDI PADA PT. PATIWARE PLANTATION DI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT)
Yuni Siswanti dan Marlita Rahmadhani 691

EFEKTIVITAS PROMOSI SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA SUATU ORGANISASI YANG INOVATIF
Istiharini, SE.,MM dan Regina Deti.,SE.,MM 709

PENGARUH STRATEGI INOVASI PADA KINERJA PERUSAHAAN DENGAN SISTEM INFORMASI INOVASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Asep Rokhyadi dan Martinus Budiantara 715

IDENTIFIKASI IKLIM ORGANISASI : MENGEMBANGKAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN YANG INOVATIF .
Regina Deti, SE., MM 732

THE EFFECT OF CONSUMER CONFUSION PRONENESS ON WORD OF MOUTH, TRUST, AND CUSTOMER SATISFACTION
Malisa Rosadi and Fandy Tjiptono 742

PENGARUH TEKNOLOGI, PERSONAL KNOWLEDGE DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Hermin Endratno 756

Eksplorasi Motif Pengelola Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan BPR dalam Preferensi Penerapan SAK ETAP di Yogyakarta

Anna Purwaningsih, SE., M.Si., Ak.
Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: annapurwaningsih1977@gmail.com

Abstract

This research aims at finding out (1) if entity without public accountability and BPR in Yogyakarta have decided to adopt SAK ETAP; and (2) what are the factors which lead entity without public accountability and BPR to adopt SAK ETAP.

This research employed ***in depth interview*** *technique as an explanatory technique to collect information through interview to arrive at deep comprehension. The respondents chosen in this research come from 11 small medium enterprises and 5 BPRs.*

The result shows that all of the BPR respondents have adopted SAK ETAP as regulated by Bank Indonesia in Surat Edaran BI No.11/37/DKBU on Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. But, other respondents do not apply SAK ETAP with the following arguments: (a) they know about SAK ETAP but they have employed SAK Umum for a long time so they are reluctant to adopt the new one; (b) they do not know about SAK ETAP so they still employ SAK Umum; (c) they do not know about SAK ETAP and SAK Umum so they work with simple report; (d) they do not know about SAK ETAP and SAK Umum and so far they use software AB Pro. Based on the in depth interview with 16 respondent enterprises, it can be concluded that in 2011 small medium enterprises in Yogyakarta did not adopt SAK ETAP but the BPR did. The reasons of not adopting SAK ETAP divide into two: their lack of knowledge on SAK ETAP and their dependence on the SAK Umum.

Keywords: Entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), SAK Umum, SAK ETAP, *in depth interview, BPR*

I. PENDAHULUAN

Manajemen perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua modal yang telah dipercayakan pemilik kepada perusahaan. Selain kepada pemilik, manajemen perusahaan juga harus mempertanggungkan semua praktik peru-sahaan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder)*. Pertanggungjawaban manajemen kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dilakukan perusahaan dengan membuat dan memublikasikan laporan keuangan perusahaan kepada publik.

Laporan keuangan yang dibuat perusahaan harus disusun berdasarkan standar keuangan yang berterima umum. Standar keuangan yang berlaku di Indonesia adalah standar akuntansi keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK berisi aturan-aturan pengakuan, pengukuran, dan penilaian semua elemen-elemen

dalam laporan keuangan. Ada tiga pilar SAK, yaitu PSAK, SAK ETAP, dan SAK syariah (KAP Deloitte, 2010).

Laporan keuangan semua perusahaan yang ada di Indonesia harus disusun berdasarkan SAK agar laporan keuangan antar perusahaan dapat diperbandingkan. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut tidak akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperoleh sumber permodalan, banyak perusahaan listing di bursa efek. Dengan demikian, saham perusahaan diperjualbelikan di bursa efek tersebut. Saat ini, banyak perusahaan yang tidak hanya listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun juga ada beberapa perusahaan yang listing di bursa efek luar negeri. Sebalik-nya, banyak pula perusahaan asing yang listing di BEI.

Perusahaan yang listing di luar negeri harus tunduk dengan standar akuntansi di negara tersebut, sebaliknya perusahaan yang listing di Indonesia harus tunduk dengan SAK Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan biaya untuk menyesuaikan dengan aturan dimana perusahaan tersebut listing. Dengan adanya kondisi tersebut, muncul gagasan dari semua negara, termasuk Indonesia, untuk menyusun standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Akhirnya muncullah standar akuntansi yang berlaku secara internasional, yaitu IFRS (International Financial Reporting Standard). IFRS ini akan diadopsi secara penuh di Indonesia pada tahun 2012. Aturan dalam IFRS terlalu komplek untuk diterapkan untuk perusahaan kecil dan menengah.

Hal itulah yang selanjutnya mendorong diterbitkannya standar akuntansi keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dikenal dengan SAK ETAP pada tanggal 17 Juli 2009. SAK ETAP tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011, sebelum IFRS berlaku efektif. Dengan demikian entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), umumnya UKM dapat memilih standar ini (Basir, 2010). Namun, tidak menutup peluang bagi ETAP dan UKM untuk mengadopsi IFRS jika mampu.

SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan (KAP Deloitte, 2010). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas secara signifikan adalah entitas yang tidak tercatat di pasar modal, tidak sedang dalam proses untuk pengajuan pernyataan pendaftaran di pasar modal, dan bukan lembaga keuangan. Sebaliknya, jika otoritas pembuat aturan memberikan ijin, entitas dengan akuntabilitas publik signifikan pun dapat menggunakan SAK ETAP. Contoh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan yang diijinkan untuk menggunakan SAK ETAP adalah Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Tahun ini, tepatnya mulai 1 Januari 2011 merupakan tonggak waktu yang penting. Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI, pada 1 Januari 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik, dapat memilih untuk menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2011 suatu Entitas tanpa akuntabilitas publik menetapkan penggunaan PSAK Umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan PSAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke PSAK ETAP itu, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategik bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai (Basir, 2010).

Selain SAK mana yang dipilih pada tahun 2011 tidak dapat direvisi lagi, perlu dipertimbangkan pula bahwa penerapan suatu SAK menyangkut isu strategik (Basri, 2010). Hal itu dikarenakan pengambilan pilihan tersebut berdampak jangka panjang dan mempengaruhi arah perusahaan di masa depan. Perusahaan yang saat ini merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, misalnya UKM, tidak memiliki eksposure ke pengguna eksternal sehingga akan lebih sederhana menggunakan SAK ETAP. Namun demikian, jika

ke depan perusahaan itu sudah memiliki rencana-rencana untuk menjadi perusahaan menengah-besar, ada eksposure pengguna eksternal, membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan, atau bahkan melibatkan pihak internasional. Dengan demikian entitas tersebut perrlu mempertimbangkan untuk tetap menggunakan SAK Umum. Walaupun SAK Umum lebih rumit dibandingkan dengan SAK ETAP, namun jika selama ini entitas tersebut sudah menggunakan SAK Umum maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tentu tidak terlalu asing dengan SAK tersebut. Selanjutnya perusahaan tinggal melakukan penyesuaian-penyesuaian ke arah SAK baru yang akhir-akhir ini terus menerus diterbitkan oleh DSAK IAI sejalan dengan adopsi IFRS. Sebaliknya, jika Entitas tanpa akuntabilitas publik ini belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangan, tidak ada eksposure ke pengguna eksternal atas laporan keuangannya, maka entitas tersebut tidak perlu menerapkan SAK Umum, atau setidak-tidaknya dapat menunda keputusan penggunaan SAK Umum hingga pada saatnya nanti memandang SAK Umum tersebut perlu diterapkan. Dalam hal demikian, Entitas tersebut harus sudah memutuskan selambat-lambatnya tahun 2011 untuk menerapkan PSAK ETAP (Basri, 2010).

1.1. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah entitas tanpa akuntabilitas publik di Yogyakarta telah memutuskan untuk mengadopsi SAK ETAP?
2. Faktor apa yang mendorong entitas tanpa akuntabilitas publik memilih mengadopsi SAK ETAP?

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah:

1. Entitas tanpa akuntabilitas publik dan BPR di Yogyakarta telah memutuskan untuk mengadopsi SAK ETAP?
2. Faktor yang mendorong entitas tanpa akuntabilitas publik dan BPR memilih untuk mengadopsi SAK ETAP?

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengambil kebijakan dan profesi akuntansi, penelitian ini dapat menjadi media penjajakan mengenai penggunaan SAK ETAP.
2. Bagi dunia akademisi, penelitian ini memberikan informasi awal mengenai masih perlu tidaknya sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan BPR Yogyakarta sebagai bentuk pengabdian mereka di dunia pendidikan.

II. LANDASAN TEORI

2.1. SAK Umum

SAK yang diterapkan oleh setiap Entitas penyaji laporan keuangan adalah PSAK Umum. PSAK Umum tersebut, secara bertahap oleh DSAK IAI, sedang dirubah dengan mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS), sehingga pada tahun 2012 seluruh PSAK merupakan hasil adopsi dari IFRS. Oleh karena itu, pada entitas tanpa akuntabilitas publik yang saat ini menerapkan PSAK Umum dan bermaksud akan menerapkan PSAK ETAP, pada tahun 2011 harus melakukan perubahan kebijakan akuntansinya. Sebaliknya, bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik tidak perlu

melakukan penyesuaian apapun, karena entitas ini hanya melanjutkan saja, hingga akhirnya nanti pada tahun 2012 menerapakan PSAK Umum yang sudah terkonvergensi dengan IFRS (Basri, 2010).

2.2. SAK ETAP

SAK ETAP diterbitkan karena IFRS terlalu komplek untuk diadopsi oleh ETAP dan UKM. Meskipun demikian, ETAP dan UKM dapat memilih menggunakan IFRS jika merasa mampu. SAK ETAP awalnya mengikuti *IFRS for SMEs* (Small, Medium Entreprises), namun *IFRS for SMEs* masih terlalu komplek untuk ukuran perusahaan menengah di Indonesia, sehingga SAK ETAP berbeda secara signifikan dengan *IFRS for SMEs*.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan adalah (1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang dikatagorikan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan harus menggunakan PSAK Umum. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan akan diperbolehkan menggunakan SAK ETAP bila ada regulasi yang mengizinkannya, misalnya BPR.

Beberapa alas an terbitnya SAK ETAP antara lain adalah: (1) PSAK–Umum sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat penentuan *fair value* memerlukan biaya yang tidak murah; (2) PSAK Umum rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55. Meskipun sudah disahkan pada tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi); (3) PSAK Umum menggunakan *principle based* sehingga membutuhkan banyak *professional judgement*; dan (4) PSAK Umum perlu dokumentasi dan IT yang kuat

Beda PSAK dengan SAK ETAP adalah SAK ETAP merupakan penyederhanaan dari PSAK, yaitu (1) pilihan alternatif standar yang lebih sederhana; (2) penyederhanaan dalam hal pengakuan dan pengukuran; serta (3) pengurangan pengungkapan (KAP Deloitte, 2010). SAK ETAP juga merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan. Namun demikian, SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement, meskipun tidak sebanyak PSAK Umum.

Adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil menengah mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Dengan demikian perusahaan kecil menengah dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya, pinjaman bank) untuk pengembangan usaha.

SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP. Oleh karena itu, per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.

2.3. Perbedaan SAK Umum dan SAK ETAP

Berikut ini perbedaan antara SAK Umum dan SAK ETAP (www.keuanganlsm.com, 15 Juli 2011):

Tabel 2.1
Perbedaan SAK Umum dan SAK ETAP

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	• Laporan posisi keuangan • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan • Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang • Aset lancar • Liabilitas jangka pendek • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan	Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca yang menghilangkan pos: • Aset keuangan • Properti investasi yang diukur pada nilai wajar • Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar • Kewajiban berbunga jangka panjang • Aset dan kewajiban pajak tangguhan • Kepentingan nonpengendalian
2	Laporan Laba Rugi	▪ Laporan laba rugi komprehensif • Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif • Laba rugi selama periode • Pendapatan komprehensif lain selama periode • Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	• Catatan atas laporan keuangan • Struktur • Pengungkapan kebijakan Akuntansi • Sumber estimasi ketidakpastian • Modal • Pengungkapan lain	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.
5	Laporan Arus Kas	• Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung • Arus kas aktivitas investasi • Arus kas aktivitas pendanaan • Arus kas mata uang asing • Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas	Sama dengan PSAK kecuali: • Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung • Arus kas mata uang asing, tidak diatur.
6	Laporan keuangan Konsolidasi dan terpisah	• Persyaratan penyajian laporan keuangan konsolidasi • Entitas bertujuan khusus • Prosedur konsolidasi	Tidak diatur

		• Laporan keuangan tersendiri • Laporan keuangan gabungan	

7	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih untuk periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi)
		▪ Laba atau rugi bersih untuk Periode berjalan
		  • Pos luar biasa
		  • Laba atau rugi dari aktivitas normal
		  • Operasi yang tidak dilanjutkan
		  • Perubahan estimasi Akuntansi
		▪ Kesalahan Mendasar
		▪ Perubahan kebijakan Akuntansi
		  • Penerapan suatu standar Akuntansi keuangan
		  • Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain
			• Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi
			• Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi
			• Perubahan Estimasi akuntansi
			• Kesalahan.
			SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada "kesalahan mendasar" dan "laba atau rugi luar biasa").

8	Instrumen Keuangan Dasar	• Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan • Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan • Impairment menggunakan incurred loss concept • Derecognition • Hedging dan derivatif	• Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu • Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tsb mengacu ke PSAK 50 (1998).
9	Persediaan	• Pengukuran persediaan • Biaya persediaan • Biaya pembelian • Biaya konversi • Biaya lain-lain • Biaya persediaan pemberian jasa • Teknik pengukuran biaya • Rumus biaya • Nilai realisasi bersih • Pengakuan sebagai beban • Pengungkapan	Sama dengan PSAK
10	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	• Ruang lingkup: entitas asosiasi • Metode akuntansi • Metode biaya • Metode ekuitas • Model nilai wajar	• Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak • Metode akuntansi • Entitas asosiasi : metode biaya • Entitas anak : metode ekuitas
11	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	• Jointly controlled operation, asset, and entity • Metode akuntansi • Metode konsolidasi proporsional • Metode ekuitas • Model nilai wajar	Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya menggunakan metode biaya.

12	Property Investasi	Metode akuntansi :
		  • Model nilai wajar
		  • Model biaya
			Metode akuntansi:
			  • Model biaya

13	Aset Tetap	• Menggunakan pendekatan komponenisasi • Pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi • Pengukuran biaya perolehan • Pengakuan pengeluaran selanjutnya • Penyusutan • Tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi perubahan saja	Sama dengan PSAK kecuali: • Tidak menggunakan pendekatan komponenisasi. • Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994) • Tidak perlu review nilai residu.
14	Asset Tidak Berwujud	• Prinsip umum untuk pengakuan • Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya • Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun • Penurunan nilai	Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha.
		• Menggunakan metode pembelian • Goodwill diamortisasi 5 atau 20 tahun dengan justifikasi manajemen	Tidak diatur
15	Sewa	• Mengatur perjanjian yang mengandung sewa • Klasifikasi bersifat *principle based* • Laporan keuangan lessee dan lessor	• Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (ISAK 8) • Klasifikasi sewa: kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 • Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): *Akuntansi Sewa Guna Usaha*
16	Kewajiban	• Kewajiban diestimasi • Kewajiban kontinjensi • Aset kontinjensi	Sama dengan PSAK
17	Ekuitas	• Penjelasan • Akuntasi ekuitas untuk badan usaha bukan PT • Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT • Reorganisasi • Selisih penilaian kembali	Sama dengan PSAK, kecuali : – Reorganisasi – Selisih penilaian kembali
18	Pendapatan	• Penjualan barang • Penjualan jasa • Kontrak konstruksi • Bunga, dividen dan royalti • Lampiran kasus pengakuan pendapatan	Sama dengan PSAK.
19	Biaya Pinjaman	• Komponen biaya pinjaman • Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman	Biaya pinjaman langsung dibebankan

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
20	Penurunan Nilai Aset	• Penurunan nilai persediaan • Penurunan nilai non-persediaan • Penurunan nilai goodwill	Sama dengan PSAK, kecuali: • Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset. • Tidak mengatur penurunan nilai goodwill • Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan* paragraf 16 dan 17.
21	Imbalan Kerja	• Imbalan kerja jangka pendek • Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC • Imbalan jangka panjang lainnya • Pesangon pemutusan kerja	Sama dengan PSAK, kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan
22	Pajak Penghasilan	• Menggunakan *deferred tax concept* • Pengakuan dan pengukuran pajak kini • Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan	• Menggunakan *tax payable concept* • Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan
23	Mata Uang Pelaporan	• Mata uang pencatatan dan pelaporan • Mata uang fungsional • Penentuan saldo awal • Penyajian komparatif • Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan	Sama dengan PSAK *Mata Uang Pelaporan* • Mata uang fungsional • Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional • Perubahan mata uang fungsional (Pada prinsipnya sama)
24	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	• Peristiwa yang memerlukan penyesuaian • Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian	Sama dengan PSAK
25	Pengungkapan pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa	• Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Pengungkapan	Sama dengan PSAK 7

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
26	Aktivitas Khusus	• Akuntansi perkoperasian • Akuntansi minyak dan gas bumi • Akuntansi pertambangan umum • Akuntansi perusahaan efek • Akuntansi reksa dana • Akuntansi perbankan dan asuransi	Tidak diatur
27	Ketentuan Transisi		• Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba) • Perpindahan dari dan ke SAK ETAP
28	Tanggal Efektif		Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010

III. METODE RISET

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan BPR yang berada di wilayah Yogyakarta. Sampel penelitian sebanyak 10 entitas.

3.2. Studi Eksplaratori

Studi eksploratori dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang ide masalah penelitian. Studi eksploratori juga dapat dilakukan jika area penelitian merupakan bidang yang baru sehingga perlu dilakukan untuk mempelajari sesuatu kemungkinan dilema yang dihadapi pelaku (Cooper & Schindler, 2001).

Dalam studi ini digunakan teknik *in depth interview* yang merupakan teknik studi eksploratori untuk memperoleh informasi melalui wawancara secara individual untuk memperoleh pemahaman mendalam. Teknik *in depth interview* merupakan teknik pengumpulan informasi dari sejumlah interaksi individu yang dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan dan melakukan pengamatan secara langsung (Neuman, 2000).

Tujuan studi eksploratori adalah untuk merumuskan masalah secara lebih akurat dan tepat, mengidentifikasi rangkaian tindakan yang relevan, atau mendapatkan wawasan tambahan sebelum menyusun rancangan penelitian (Malhotra, 2004). Studi eksploratori dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pemahaman entitas tanpa akuntabilitas publik terhadap SAK ETAP dan faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan SAK ETAP.

Peserta *in depth interviews* yang dipilih dalam studi eksploratori ini telah ditentukan berdasarkan kriteria entitas tanpa akuntabilitas publik, seperti UKM dan BPR. *In depth interview* dilakukan pada 10 orang responden dengan waktu sekitar 45-60 menit. Responden yang dipilih adalah orang yang paham akuntansi dan membuat keputusan mengenai kebijakan akuntansi di perusahaan/usaha tersebut. Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara standar mempergunakan skedul wawancara yang telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Daftar pertanyaan terbuka dalam *in depth interviews* adalah sebagai berikut ini:

1. Apa yang Anda ketahui tentang SAK Umum?
2. Apa yang Anda ketahui tentang SAK ETAP?
3. Dari mana Anda mengetahui mengenai ETAP?
4. Mengapa Anda memilih menggunakan ETAP?
5. Faktor apa yang menjadi pertimbangan Anda memilih ETAP?
6. Apa manfaat bagi perusahaan jika Anda memilih ETAP?

3.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.3.1. Daftar Sampel

Pada proposal awal direncanakan *in dept interview* dilakukan terhadap 10 responden, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Yogyakarta. Namun, pada pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat peneliti melakukan penambahan responden menjadi 16 perusahaan, yang terdiri dari 11 perusahaan kecil menengah dan 5 BPR. Berikut ini daftar perusahaan yang menjadi sampel:

Tabel 4.1
Daftar Sampel

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat
1	C59 (PT. Citra Mitra Sejati)	Usaha garmen (pabrikan dan mode)	Jl. Magelang Km.7-8, Gg. Melati Blondong No.66, Mlati Sleman Telp.869216
2	PT. Budi Makmur Jayamurni	Pabrik penyamakan kulit, tujuan ekspor	Jl. Peleman No.9, Rejowinangun, Kotagede dan Jl. Muja Muju No.21, Umbulharjo
3	Jogjakarta Plaza Hotel	Perhotelan dengan nuansa tradisional Jawa	Jl. Affandi Gejayan, Kompleks Colombo Telp. 584222
4	PT. BPR Bina Artha Swadaya	Perkreditan	Jl. Wates Km.3, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Telp. 765377
5	PT. Syncore Consulting & System	Perusahaan Jasa	Jl. Gatotkaca No.405, Gedongkuning, Yk Telp. 450933

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat
6	CV. FujiRO	Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) & pembuat mesin filter air	Jl. Rejowinangun 4, Yogyakarta Telp. 4438838
7	BPR Walet Jaya Abadi	Perkreditan	Jalan Brigjen Katamso no. 282 Yogyakarta Telp.388677
8	Larissa *Aesthetic Centre*	Penataan Kecantikan dengan bahan alami	Jl. C. Siamanjuntak 78, Yogyakarta
9	BPR Artha Sumber Arum	Perkreditan Berbasis Syariah	Jl. Solo (Laksda Adisucipto Km. 6,5 No. 31, Sleman Telp. 489083
10	BPR Shinta Putra Pengasih	Perkreditan	Jl. Mandung Km. 0.5, Terban, Pengasih, Kulon Progo. Telp.773959-774941
11	BPR Shinta Daya	Perkreditan	Jl. Jogja-Solo Km.15, Bogem, Kalasan, Sleman Telp. 496036 Email: bpr_shinta_daya@yahoo.com
12	PT. Jawa Furni Lestari	Furniture	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.8,2 Karangmloko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman
13	EXISTCOMM	Periklanan	Jl. Bakung 17, Banciro Telp. 518686
14	Indomaret (Regional DIY)	Retail	Jl. Ringroad Barat No.99, Trihanggo, Gamping, sleman 55514
15	Yanto Pottery	Kerajinan Keramik (ekspor)	Jl. Raya Kasongan 223, Bantul, Yk Telp. 7470944

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat
16	PT. Barumum Abadi	Money Changer	Hotel Inna Garuda, Lobby Selatan, Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta, telepon (0274) 561155 (Hunting), 566353 Ext.1400, email: marketing @barumun-money.com. Cabang di Inna Bali Hotel, Jl. Veteran No.3 Denpasar, Bali, telp (0361) 235058, 235072

3.3.2. Hasil *in Depth Interview*

Berikut ini hasil in dept interview terhadap responden penelitian:

Tabel 4.2
Hasil *in Depth Interview*

Omset setahun (dalam Rp)	SAK yang Diterapkan		Keterangan
	SAK Umum	SAK ETAP	
1. C59 (PT. Citra Mitra Sejati)			
5.400.000.000	√		Menggunakan Software AB-Pro mulai tahun 2000
2. PT. Budi Makmur Jayamurni Yogyakarta			
120.000.000.000	√		Alasan: (1) sudah terlanjur memakai SAK Umum, butuh biaya untuk berubah ke SAK ETAP, (2) SAK ETAP untuk perusahaan kecil menengah sedangkan perusahaan ini akan segera menjadi perusahaan besar
3. Jogjakarta Plaza Hotel			
25.000.000.000	√		Sesuai dengan induknya Prime Plaza Hotel
4. PT. BPR Bina Artha Swadaya			
4.200.000.000		√	Sejal awal tahun 2010

Omset setahun (dalam Rp)	SAK yang Diterapkan		Keterangan
	SAK Umum	SAK ETAP	
5. PT. Syncore Consulting & System			
600.000.000 (dari konsultasi, sedangkan omset dari pembuatan system tidak bersedia menyebutkan)	√		Mengetahui SAK ETAP tetapi memilih SAK Umum dengan alasan perusahaan masih baru
6. CV. FujiRO			
150.540.000.000, yang terdiri dari 5.000.000.000 (penjualan mesin) & 1.000.000.000 (penjualan air) & 144.540.000.000 (royalty penjualan air dari 198 depot)	√		Sudah terbiasa sejak dulu menggunakan SAK Umum
7. BPR Walet Jaya Abadi			
Kredit: 1.250. 000.000; Tabungan: 30.000.000; Deposito: 500.000.000		√	Menerapkan SAK ETAP sejak awal 2010
8. Larissa *Aesthetic Center*			
3.000.000.000	√		Mengacu SAK Umum tetapi masih belum utuh hanya untuk tujuan pembuatan laporan keuangan. Namun, sekarang sedang mencari konsultasn untuk menerapkan SAK ETAP
9. BPR Artha Sumber Arum			
12.260.430		√	Sejak Januari 2011
10. BPR Shinta Putra Pengasih Yogyakarta			
20.000.000.000		√	Sejak Oktober 2010
11. BPR Shinta Daya			
26.000.000.000		√	Sejak Januari 2010

Omset setahun (dalam Rp)	SAK yang Diterapkan		Keterangan
	SAK Umum	SAK ETAP	
12. PT. Jawa Furni Lestari			
14.400.000.000	√		Sejak dulu sudah memakai SAK Umum
13. Perusahaan Jasa Periklanan EXISTCOMM			
15.000.000.000	√		Belum tahu SAK ETAP
14. Indomaret (Regional DIY)			
78.000.000.000	√		Sudah sejak berdiri
15. Yanto Pottery			
600.000.000.000		√	Sejak Januari 2011
Omset setahun (dalam Rp)	**SAK yang Diterapkan**		**Keterangan**
	SAK Umum	**SAK ETAP**	
16. PT. Barumum Abadi			
350.000.000.000		√	Sesuai aturan BI dan tidak ada rencana untuk *go public.*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini yang berjumlah 16 perusahaan terdiri dari 5 BPR, 1 perusahaan periklanan, 5 perusahaan manufaktur, 1 konsultan, 1 perusahaan retail, 1 perusahaan kecantikan, 1 *money changer*, dan 1 perhotelan yang berada di Yogyakarta. Secara umum, semua responden BPR telah menerapkan SAK ETAP sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu, untuk responden perusahaan lainnya yang selama ini telah mengadopsi SAK Umum memilih tetap menerapkan SAK Umum karena beberapa alasan, antara lain (1) sudah terlanjur memakai SAK Umum sejak dahulu sehingga harus akan memakan waktu banyak untuk berubah; dan (2) membutuhkan biaya besar untuk mengikutkan karyawan dalam pelatihan SAK ETAP. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah memakai SAK Umum enggan untuk beralih ke SAK ETAP.

Perusahaan selain BPR yang menggunakan SAK ETAP hanya satu responden, yaitu Yanto Pottery. Pertimbangan Yanto Pottery adalah karena ingin memperoleh kemudahan dalam pencatatan akuntansi. Selain itu, Yanto Pottery yang bergerak dalam ekspor keramik tidak berencana untuk *go public.*

V. Simpulan dan Saran

V.1. Simpulan

Perusahaan responden, yang berupa BPR, semua telah mengadopsi SAK ETAP sesuai dengan aturan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Namun, responden lainnya tidak menerapkan SAK ETAP dengan alasan antara lain adalah:

1. Sudah mengetahui SAK ETAP namun terlanjur menggunakan SAK Umum sejak lama sehingga enggan untuk beralih ke SAK ETAP.
2. Belum mengetahui SAK ETAP, selama ini menggunakan SAK Umum sehingga sampai saat ini tetap menggunakan SAK Umum.
3. Belum mengetahui mengenai SAK ETAP dan SAK Umum, selama ini hanya melakukan pencatatan sederhana, yang penting dapat menyusun laporan keuangan.
4. Belum mengetahui SAK ETAP dan SAK Umum, namun selam ini hanya tahunya perusahaan menggunakan software AB Pro.

Dari hasil *in depth interview* terhadap 16 perusahaan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan kecil menengah di Yogyakarta pada tahun 2011 ini belum menerapkan SAK ETAP, sedangkan semua BPR yang menjadi responden sudah menerapkan SAK ETAP. Motif belum digunakannya SAK ETAP oleh perusahaan responden, selain BPR, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu karena ketidaktahuan responden mengenai SAK ETAP dan karena responden sudah terlanjur sejak dulu menggunakan SAK Umum.

V.2. Saran

Perlu kiranya diadakan sosialisasi mengenai Sak ETAP dan dampak penerapan SAK ETAP terhadap usaha kecil dan menengah serta prospek ke depan yang terkait dengan adopsi SAK ETAP tersebut. Sosialisasi ini sebaiknya segera karena laporan keuangan 2011 ini perusahaan sudah harus memilih akan menggunakan SAK yang mana. Setelah tahun 2011 maka perusahaan tidak boleh mengubah SAK yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Basir, Syarief., (2010), Persiapan Penerapan PSAK ETAP. Audit Partner KAP Syarief Basir dan Rekan. www.google.com, diunduh tanggal 5 Januari 2011.

Cooper, Donald R. Dan Schindler, Pamela S. 2008. *Business Research Methods.* Tenth Edition. New York: McGraw Hill International.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.* IAI, Jakarta.

KAP Deloitte. 2010. Pemberdayaan UKM Melalui Peningkatan Kompetensi SDM UKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP dan Pengaruh Perpajakannya. FEB, UGM (19-20 Juli 2010).

Malhotra, Naresh K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation,* Fourth Edition, New Jersey: Pearson Education International.

Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,* Fourth Edition, Allyn and Bacon.

http://www.keuanganlsm.com/2010/10/21/perbedaan-sak-etap-dengan-psak/ diakses tanggal 15 Juli 2011.